

KATA PENGANTAR

Politik sering disalahmengertikan oleh sebagian orang sebagai suatu kegiatan yang kotor, penuh intrik, manipulasi, kecurangan, dan konflik. Dalam beberapa aspek, sinyalemen itu bisa jadi benar mengingat politik memiliki keterkaitan erat dengan perebutan dan kompetisi kekuasaan, yakni kecenderungan seseorang atau kelompok ingin mendominasi orang atau kelompok lain dengan cara apapun. Akan tetapi, sesungguhnya politik bukanlah sekedar hanya tentang kekuasaan, melainkan juga hubungan antar manusia. Harold H. Saunders (2005), seorang mantan pejabat senior di Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan bahwa fokus utama politik adalah *"a process of continuous interaction engaging significant clusters of citizens in and out of government and the relationships they form to solve public problems in whole bodies politic across permeable borders, within or between countries"*. Politik intinya adalah interaksi terus menerus dari berbagai macam kelompok manusia yang membentuk pemerintahan untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup mereka dalam satu atau antar negara.

Oleh karena itu, proses dan fenomena politik bersifat sangat dinamis dan senantiasa menarik untuk diikuti. Hanya saja, untuk dapat mengerti secara mendalam tentang bagaimana sesungguhnya fenomena politik bekerja, kita harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang dasar-dasar ilmu politik.

Buku di tangan anda ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran pemikiran dan gagasan yang sekiranya dapat dijadikan tambahahan

wawasan bagi kita tentang apa itu ilmu politik, apa saja cakupan ilmu politik, bagaimana politik bekerja, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan fungsinya, bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen yang ada pada suatu negara, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pengelolaan negara yang lebih baik.

Saya berpendapat bahwa khasanah literatur ilmu politik di Indonesia, terutama yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, masih cukup terbatas jumlahnya. Buku yang ada seringkali bersifat sangat *scientific* dan kurang praktis untuk dipahami secara mudah. Oleh karenanya saya memandang perlu menulis buku tentang ilmu politik dengan bahasan yang simple, dan dapat diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk: aparatur pemerintah, kalangan anggota DPR/DPRD, pengurus partai politik, LSM, pengusaha, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya yang ingin belajar ilmu politik.

Saya berhutang budi dan pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Diponegoro yang mendorong saya untuk terus menulis.

Untuk ayahanda tercinta, ibunda, istri penulis tercinta, buku ini adalah tanda bakti dan cinta kepada kalian.

Semoga buku ini dapat menjadi wacana diskusi dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pencari ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Juni 2019

PENULIS B

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
Bab 1	1
PENTINGNYA BELAJAR ILMU POLITIK	1
APAKAH ILMU POLITIK?	12
KESIMPULAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
Bab 2	23
PENDEKATAN TRADISIONAL	24
PENDEKATAN MODERN	28
KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
Bab 3	43
PENDAHULUAN	43
KONSEP DAN DEFINISI TENTANG NEGARA	45
DEFINISI NEGARA	48
ELEMEN-ELEMEN NEGARA	51
ELEMEN POLITIK	54
BENTUK-BENTUK NEGARA	58
TEORI LEGITIMASI NEGARA	64
FUNGSI DAN PERAN NEGARA	67
BENTUK PEMERINTAHAN	74
KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	82
Bab 4	85
PENGERTIAN KEDAULATAN	86
KEDAULATAN DAN KEWARGANEGARAAN	91

KARAKTERISTIK DAN ATRIBUT KEDAULATAN	94
KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
Bab 5	98
PENGERTIAN	98
SEJARAH	101
KARAKTERISTIK	105
VARIASI PEMERINTAHAN DEMOKRASI	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
Bab 6	121
APAKAH IDEOLOGI.....	122
LIBERALISME.....	127
KONSERVATISME	134
SOSIALISME.....	137
FASISME	144
ENVIRONMENTALISM.....	146
FEMINISME	148
KESIMPULAN	149
DAFTAR PUSTAKA.....	149
Bab 7	152
KONSEP DAN DEFINISI	154
ISI KONSTITUSI	160
PERSYARATAN KONSTITUSI YANG BAIK	164
KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS	166
KONSTITUSI DAN DEMOKRASI	170
MAHKAMAH KONSTITUSI.....	173
KONSTITUSI DI INDONESIA.....	175
KESIMPULAN	176
DAFTAR PUSTAKA.....	176
Bab 8	178
PENGERTIAN	179
PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK.....	181
TIPE-TIPE PARTAI	182
FUNGSI PARTAI POLITIK.....	186

SISTEM KEPARTAIAN	189
PARTAI POLITIK DI INDONESIA.....	193
KESIMPULAN	198
DAFTAR PUSTAKA.....	199
INDEX.....	203

Bab 1

Memahami Ilmu Politik

TUJUAN BAB INI

Setelah menyelesaikan Bab ini, anda harus mampu:

- menyebutkan alasan pentingnya belajar ilmu politik
- menjelaskan cakupan area disiplin ilmu politik
- mendiskusikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ilmu politik
- menggambarkan pokok-pokok bahasan dalam pelajaran ilmu politik
- mendefinisikan konsepsi-konsepsi dasar seperti: apakah itu politik, pemerintah, kekuasaan, pengaruh, kewenangan, dan pemilu.

PENTINGNYA BELAJAR ILMU POLITIK

Kita semua perlu belajar politik, karena pada hakekatnya, politik mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Lagi pula, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles (kadang ditulis juga Aristotle), kita semua adalah binatang politik (*man is by nature political animal*). Pada saat ini, politik dipahami dalam spektrum pengertian yang luas. Oleh karenanya ilmu politik

menjadi sebuah disiplin dimana berbagai paradigma dan ilmuwan memiliki interpretasi sains yang berbeda. Akibatnya, para ahli beserta teori yang mereka buat, termasuk dalam koleksi buku ini, tidak menggunakan pendekatan tunggal untuk mempelajari ilmu politik. Gagasan tersebut tidak perlu kita seragamkan, karena justru memperkaya cara kita memahami politik.

Tapi sebelum kita berkomitmen untuk belajar ilmu politik, bahkan pada level pengantar sekalipun, kita akan memiliki beberapa pertanyaan dasar, seperti:

- Apakah ilmu politik itu?
- Untuk apa kita belajar ilmu politik?
- Apa sajakah cakupan ilmu politik?
- Apakah ilmu ini menarik?
- Apakah ilmu ini penting?
- Adakah ada pekerjaan yang relevan dengan ilmu politik?

Bab ini akan membantu anda menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan jawaban pasti dan jelas.

Politik adalah sesuatu yang menarik

“Politik itu penting” adalah alasan dasar bagi kita untuk mempelajarinya. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, politik memiliki subyek-subyek yang menarik, amat sangat menarik, dan bahkan menghibur. Hal ini sebagian karena politik melibatkan dan mendiskusikan tokoh-tokoh terkemuka, dengan semua hal yang berkaitan dengan mereka, baik itu kekuatan, kelemahan, kekonyolan, dan keistimewaan, dan walau kita kadang tidak bisa membantu atau terlibat langsung, tetapi akan terpesona oleh warna-warni perilaku, sikap, dan pidato-pidato yang heroik dan menarik dari mereka itu. Politik adalah sesuatu yang menarik karena manusia setuju dan tidak setuju dalam banyak hal. Politik membuat hidup kita menjadi lebih dinamis. Bayangkan kalau dalam hidup kita tidak ada pemilihan presiden, pemilihan umum (pemilu), skandal politik, rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau perang antar negara, maka lembar-lembar koran atau berita televisi akan berisi cerita monoton yang hampa dan kurang bergairah.

untuk dipertahankan. Fakta riil dan yang manipulatif menjadi bercampur baur dan tidak bisa dibedakan dengan jelas. Misalnya, mungkin saja rakyat sangat marah dengan adanya peristiwa terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok radikal, akan tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa setiap peristiwa terorisme adalah sesuatu yang murni bukan desain rekayasa dari elite untuk mengalihkan perhatian publik terhadap isu tertentu, seperti skandal politik atau kebijakan yang kontroversial. Dalam kasus seperti itu, fakta riil tentang terorisme dengan skenario yang manipulatif menjadi tercampur dan menyulitkan peneliti untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi, dan implikasinya konstruksi bangunan sebuah teori yang disusun dari penelitian itu juga menjadi tidak kokoh.

Ketiga, terdapat perubahan yang dinamis dari obyek penelitian ilmu politik, sebagaimana ilmu sosial lain. Kita mengetahui, manusia adalah makhluk sosial yang berubah-ubah pemikiran, sikap, dan perilakunya dari waktu ke waktu. Tidak ada konsistensi yang permanen, melainkan sangat kondisional. Hal ini tentu berbeda dengan obyek kajian ilmu eksakta seperti kimia atau fisika. Air, misalnya, akan selalu mendidih pada suhu 100° Celcius, sehingga bagi seorang ilmuwan fisika, fakta ini dapat dijadikan acuan secara permanen kapanpun dimanapun. Tapi sikap manusia terhadap stimulan yang sama bisa berubah-ubah detik per-detik. Bisa terjadi, misalnya, pada suatu waktu seorang pemilih menyukai kandidat caleg (calon legislatif) yang berkarakter tegas, tapi pilihan bisa berubah memilih caleg yang ramah pada saat yang lain. Karena itu, hasil suatu penelitian, kajian, atau analisis politik juga sangat relatif dan tidak bisa sepenuhnya permanen.

KESIMPULAN

Bab ini mencoba untuk menjelaskan dan menunjukkan bahwa belajar politik adalah sesuatu yang menarik dan penting karena menyangkut nasib dan kehidupan kita sehari-hari. Bab ini telah membuat sketsa secara garis besar lingkup disiplin ilmu politik, menguraikan bagaimana perkembangannya, dan apa saja sub-disiplin yang ada di bawahnya. Telah diuraikan juga definisi dan penjelasan dari beberapa konsep-konsep kunci dalam ilmu politik, dan diskusi tentang berbagai perpektif politik sebagai "Ilmu yang ilmiah". Dalam bab berikutnya kita akan membahas berbagai jenis pendekatan (*approaches*) dalam mempelajari ilmu politik.

DAFTAR PUSTAKA

Easton, D. (1967) *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf.

Lasswell, H. (1958) *Politics: Who Gets What, When, How*, New York: Meridian Books.

Lindblom, Charles E. (1984), *The policy-making process, 2nd edition*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

Barber, Benjamin R (1996) *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine.

Bateman, Thomas, et al (2008). *Braving the New World: Readings in Contemporary Politics, 4th ed.* Toronto: Nelson.

Charlton, Mark, and Paul Barker, eds (2009) *Crosscurrents: Contemporary Political Issues, 6th ed.* Toronto: Nelson Education.

Chrétien, Jean (2007). *My Years as Prime Minister*. Toronto: Knopf Canada.

Huntington, Samuel P. (1992) *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.

Miliband, Ralph (1969) *The State in Capitalist Society*. London: Weidenfeld and Nicolson.

Ollman, Bertell (2000) What Is Political Science? What Should It Be? [online, diakses 21 Januari 2015, alamat: http://www.nyu.edu/projects/ollman/docs/what_poly_sci_content.php#12]

PENULIS B, and Peter J. Stoett. (2005) *Global Politics: Origins, Currents and Directions, 3rd ed.* Toronto: Thomson Nelson.

Simpson, Jeffrey. (2001) *The Friendly Dictatorship*. Toronto: McClelland and Stewart.

GLOSSARY

Apropriasi adalah tindakan Kongres atau parlemen yang memungkinkan agen-agen pemerintah federal atau pusat mengeluarkan uang untuk tujuan tertentu.

Anggaran Negara adalah suatu postur portofolio keuangan yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran suatu negara dalam masa satu tahun.

Anggaran Seimbang (*balance budget*) adalah posisi anggaran ketika total pendapatan sama dengan total pengeluaran untuk tahun fiskal.

Bias adalah tindakan yang condong mendukung atau melawan sesuatu atau seseorang; keberpihakan atau prasangka.

Bill adalah usulan legislatif yang jika disahkan oleh DPR dan Senat dan disetujui oleh Presiden menjadi hukum. Setiap bill diberi nomor.

Daerah pemilihan adalah suatu area wilayah yang berisi pemilih yang diperhitungkan untuk satu atau sejumlah jabatan politik tertentu.

Debat adalah diskusi tatap muka tentang pandangan para kandidat tentang berbagai masalah.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat, melalui pemilihan umum yang bebas dan teratur.

Federal adalah suatu model pemerintahan yang menggambarkan persatuan negara otonom yang memiliki pemerintah pusat atau yang berkaitan dengan pemerintah itu.

Globalisasi adalah suatu proses melalui mana orang terhubung, berinteraksi, bertindak dan bereaksi dengan masyarakat lintas batas negara baik secara fisik maupun juga tata nilai.

Grassroots adalah warga negara biasa dan keterlibatan/partisipasi mereka dalam proses politik.

Incumbent adalah seseorang sekarang sedang memegang jabatan atau kekuasaan.

Kampanye adalah serangkaian tindakan terencana untuk mendapatkan seseorang terpilih dalam suatu pemilihan.

Kandidat adalah seseorang yang mencari, atau yang telah diajukan untuk jabatan atau penghargaan tertentu.

Kandidat independen adalah seorang kandidat yang tidak termasuk dalam salah satu partai politik utama.

Konstituen adalah orang yang memiliki hak untuk memilih atau pemilih yang diwakili oleh pejabat tertentu yang mereka pilih.

Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah atau perselisihan melalui peran pihak ketiga yang dinilai tidak memihak (impartial) dan netral dalam konflik tersebut, dan bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan bersama yang memuaskan.

Partai politik adalah sekelompok orang yang bergabung bersama karena mereka berbagi banyak ide tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Pemilihan Umum adalah proses dimana orang yang memenuhi syarat memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik.

Platform politik adalah pernyataan publik tentang prinsip, tujuan, dan kebijakan partai politik, dan rencana mereka.

Voting adalah cara orang dapat memberikan suara ketika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah dalam suatu sidang atau pemilihan.

Warganegara adalah seseorang yang merupakan anggota suatu negara atau negara; warga negara memiliki tugas dan hak tertentu.

INDEX

A

ability to know, 10, 206
Adolf Hitler, 4, 76, 145, 206
adversarial, 4, 206
Afganistan, 4, 46, 206
Afghanistan, 5, 11, 122, 206
Americanists, 14, 206
Amerika, iv, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 25, 30, 33, 47,
49, 53, 56, 61, 63, 69, 71, 76, 79, 93, 100,
106, 109, 111, 115, 116, 123, 132, 133,
134, 148, 149, 158, 159, 161, 162, 163,
166, 167, 179, 182, 190, 191, 206
analisis statistik, 14, 29, 206
antagonis, 26, 206
antagonistic, 4, 206
antiterorisme, 7, 206
aparatur, v, 8, 68, 206
approaches, 20, 23, 24, 206
APSA, 16, 206
APSR, 16, 206
Ariel Sharon, 4, 206
Aristoteles, 1, 5, 12, 13, 25, 45, 53, 86, 171,
206
ASEAN, 11, 46, 206
Attractor, 18, 206
Augusto Pinochet, 4, 76, 206
Australia, 4, 5, 11, 50, 54, 58, 64, 93, 117,
167, 192, 206

B

BBM, 7, 206
bea, 7, 206
behavioralism, 14, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 206

behavioralist, 28, 29, 31, 206
Behaviouralism, 29, 30, 31, 32, 206
Bismarck, 16, 206

C

CBC, 4, 206
Chile, 4, 76, 206
collaborative, 4, 113, 206
conflict resolution, 7, 206
cukai, 7, 206

D

Darwin, 8, 132, 206
demokrasi, 17, 33, 35, 47, 60, 65, 72, 73, 75,
78, 79, 80, 81, 86, 91, 92, 93, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 124, 131, 143, 144, 146,
147, 152, 153, 159, 170, 171, 172, 176,
178, 183, 186, 187, 196, 206
demonstrasi, 5, 17, 94, 206
DPR, v, 2, 29, 31, 116, 163, 168, 174, 175,
187, 197, 198, 200, 206

E

eksakta, 17, 18, 20, 206
eksekutif, 27, 31, 45, 55, 69, 81, 106, 108,
114, 119, 154, 163, 168, 173, 178, 185,
206
eksperimental, 14, 15, 207
eksperimentasi, 19, 207
eksploitatif, 17, 68, 72, 207
eksternal, 8, 19, 39, 47, 49, 54, 57, 88, 95,
129, 207

ekstraksi, 7, 207
elektabilitas, 19, 207
elite, 10, 17, 20, 73, 80, 99, 111, 114, 117,
136, 139, 183, 207
empiris, 19, 29, 33, 48, 207
evolusi, 8, 23, 38, 132, 154, 168, 207

F

facts, 19, 30, 207
falsehood, 19, 207
Federalism, 16, 83, 207
Ferdinand, 4, 72, 207
Filipina, 4, 207
filosofis, 24, 25, 123, 125, 126, 207
Filsafat, 25, 207
flat rate, 9, 207
free, 19, 30, 49, 100, 207

G

generalisasi, 15, 31, 33, 207
genuine, 19, 207
Global, 21, 83, 150, 207
GNI, 10, 11, 207
governance, 15, 83, 113, 207
governmental, 14, 207

H

HDI, 10, 11, 207
historical, 25, 207
historis, 15, 24, 134, 137, 169, 207
home schooling, 9, 207
Humaniora, 15, 207

I

idealistik, 17, 24, 207
ideologi, 8, 207
Imelda Marcos, 4, 207
independen, 17, 47, 55, 57, 88, 146, 201, 207
induktif, 19, 207
infaq, 10, 207
influence, 6, 207
influential, 6, 207
institusional, 24, 27, 207
institusionalisme, 14, 207
Integration, 32, 207
interaksi, iv, 12, 13, 36, 37, 105, 113, 123,
140, 142, 207

interpretivisme, 14, 207
intervensi, 8, 58, 69, 70, 72, 108, 110, 128,
133, 141, 143, 207
Intrastate, 208
Irak, 4, 11, 46, 159, 208

K

kampanye, 4, 17, 116, 208
Kanada, 3, 4, 6, 15, 64, 93, 190, 208
kapitalis, 8, 17, 67, 72, 73, 77, 123, 124, 127,
133, 141, 142, 208
kedaulatan, 17, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 60,
65, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94,
95, 96, 97, 99, 100, 101, 106, 115, 119,
160, 161, 163, 166, 167, 169, 174, 188,
208
kehakiman, 7, 174, 208
kejaksaan, 7, 208
kepolisian, 7, 62, 208
Komite Kongres, 14, 208
komunitas, 27, 48, 51, 52, 63, 74, 79, 90, 91,
92, 187, 208
Konpopilan, 4, 208
konsensus, 7, 93, 105, 113, 114, 138, 187,
192, 193, 208
konsepsional, 7, 208
konsistensi, 20, 208
kontemporer, 13, 15, 34, 99, 110, 179, 208
kontribusi, 10, 13, 42, 109, 112, 136, 140,
208
kontroversi, 5, 7, 8, 9, 196, 208
kontroversial, 3, 9, 20, 125, 147, 208
kuantifikasi, 19, 32, 208

L

legal, 25, 27, 46, 54, 65, 87, 88, 180, 190, 208
legislatif, 4, 13, 20, 27, 31, 37, 61, 69, 81,
104, 105, 114, 115, 117, 154, 157, 163,
167, 168, 170, 173, 178, 179, 185, 190,
200, 208
lembaga pemasyarakatan, 7, 208
liberal, 8, 29, 67, 101, 107, 127, 128, 129,
131, 133, 135, 146, 182, 208
Liberal Arts, 15, 208
Libya, 5, 208
life style, 10, 208
Lindblom, 17, 18, 19, 21, 41, 42, 208
LSM, v, 14, 208

M

Mahkamah Agung, 14, 174, 208
manipulatif, 18, 20, 46, 208
Margaret Thatcher, 8, 208
migrasi, 12, 50, 208
multidimensional, 16, 208

N

netral, 17, 30, 46, 47, 48, 67, 129, 148, 201, 208

O

observasi, 14, 122, 208
omnipresent, 8, 208
opini, 14, 19, 29, 169, 172, 184, 185, 208

P

pajak, 7, 9, 45, 55, 62, 66, 71, 93, 141, 143, 159, 181, 182, 188, 208
Palestina, 4, 10, 11, 91, 208
partai, v, 4, 6, 14, 27, 36, 40, 63, 64, 77, 111, 116, 124, 126, 132, 139, 145, 146, 147, 170, 175, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 208
pattern, 19, 208
Pemilu, 19, 46, 71, 79, 80, 94, 163, 187, 188, 195, 196, 197, 198, 208
PEP, 16, 209
Perang Dunia, 3, 4, 24, 91, 111, 133, 145, 146, 209
petisi, 4, 101, 107, 114, 188, 209
philosophical, 24, 25, 209
Plato, 13, 25, 26, 45, 53, 153, 209
pluralisme, 14, 101, 107, 110, 131, 209
popularitas, 19, 29, 183, 209
positivisme, 14, 209
positivistik, 14, 209
Post-behaviouralism, 29, 33, 209
post-strukturalisme, 14, 209
progressive, 9, 209
protagonis, 26, 209
pseudopolitical, 33, 209
Pure Science, 32, 209

Q

quantification, 30, 209

R

rasional, 14, 41, 65, 89, 122, 129, 188, 209
realis, 29, 209
realisme, 14, 209
Regularities, 31, 209
relatif, 12, 20, 36, 63, 72, 141, 168, 209
reliable, 19, 209
retribusi, 7, 209
Ronald Reagan, 8, 70, 209

S

Saddam Hussein, 4, 209
saintisme, 33, 209
scenario, 19, 209
sketsa, 20, 209
Socrates, 25, 209
struktural-fungsional, 29, 37, 209
strukturalisme, 14, 209
survei, 14, 32, 209
Susilo Bambang Yudhoyono, 5, 56, 209
Systematization, 32, 209

T

Techniques, 32, 209
terorisme, 20, 209
Tiananmen, 5, 209
tradisional, 23, 24, 25, 28, 30, 41, 65, 81, 102, 124, 134, 135, 136, 145, 154, 155, 174, 209
tradisionalisme, 29, 209
tragicomic, 4, 209
truth, 19, 209

U

universal, 9, 45, 72, 89, 90, 93, 95, 117, 128, 134, 149, 180, 209
universalitas, 9, 209

V

value, 19, 30, 126, 210
Verification, 31, 210

Y

Yahudi, 4, 25, 66, 77, 210
yudikatif, 27, 31, 69, 81, 154, 163, 168, 185,
210

Z

zakat, 10, 210
zero sum game, 6, 210

SINGKATAN

APSA	:	American Political Science Association
APSR	:	American Political Science Review
AS	:	Amerika Serikat
ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
BPUPKI	:	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DEIC	:	Danish East India Company
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EIC	:	East India Company
FDI	:	<i>foreign direct investment</i>
FEIC	:	French East India Company
G 30 S/PKI	:	Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia
GBHN	:	Garis Besar Haluan Negara
GERINDRA	:	Partai Gerakan Indonesia Raya
GNI	:	Gross National Income
GOLKAR	:	Golongan Karya
HANURA	:	Partai Hati Nurani Rakyat
HDI	:	Human Development Index
HEIC	:	Honourable East India Company
IPKI	:	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KNIP	:	Komite Nasional Indonesia Pusat
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	:	Mahkamah Agung
MITI	:	Ministry of International Trade and Industry
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NASAKOM	:	Nasional, Agama dan Komunis

NASDEM	:	Partai Nasional Demokrat
NSDAP	:	<i>Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei</i>
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
ORBA	:	Orde Baru
PAN	:	Partai Amanat Nasional
PARKINDO	:	Partai Kristen Indonesia
PARMUSI	:	Persatuan Muslim Indonesia
PBB	:	Partai Bulan Bintang
PBR	:	Partai Bintang Reformasi
PD	:	Partai Demokrat
PDI	:	Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	:	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDK	:	Partai Demokrasi Kebangsaan
PDS	:	Partai Damai Sejahtera
PEMILU	:	pemilihan umum
PEP	:	Presidents and Executive Politics
PG	:	Partai Golkar
PKB	:	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PKPB	:	Partai Karya Peduli Bangsa
PKPI	:	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	:	Partai Keadilan Sejahtera
PLO	:	Palestine Liberation Organisation
PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PP	:	Partai Pelopor
PPDK	:	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPP	:	Partai Persatuan Pembangunan
PSI	:	Partai Sosialis Indonesia
PT	:	<i>parliamentary threshold</i>
SBY	:	Susilo Bambang Yudhoyono
TPS	:	tempat pemungutan suara
UU	:	Undang Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar
VOC	:	<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>